

Uzbekistan Belajar dari Indonesia dan Malaysia

Oleh: **Temur Mirza** | Tanggal Upload: 14 Maret 2025



Dewan Anti-Korupsi Nasional Uzbekistan bersidang di Tashkent pada 5 Maret 2025, untuk membahas langkah-langkah anti-korupsi baru. Presiden Shavkat Mirziyoyev menggunakan pertemuan itu untuk menyoroti pencapaian baru-baru ini dan dengan jujur mengkritik kekurangan dalam memerangi korupsi. Dia kemudian mengumumkan serangkaian langkah menyeluruh yang bertujuan untuk memperkuat transparansi, penegakan, dan akuntabilitas di seluruh pemerintah. Langkah-langkah Utama Diumumkan pada 5 Maret 2025. Pada pertemuan dewan, pihak berwenang Uzbekistan menguraikan berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi secara lebih efektif. Keputusan dan reformasi utama meliputi:

- Perombakan Kepatuhan: Memberhentikan kepala unit kontrol kepatuhan di 117 kementerian dan lembaga, menggantinya dengan staf yang “jujur, berdedikasi dan profesional”, dan meminta pertanggungjawaban menteri secara pribadi atas korupsi di departemen mereka. Langkah ini bertujuan untuk menyuntikkan integritas baru ke dalam

pengawasan internal.

- **Memberdayakan Badan Anti-Korupsi:** Mengubah metode kerja Badan Anti-Korupsi (ACA) Uzbekistan. Sebagai percontohan, ACA akan mengambil alih pemantauan kepatuhan di lima entitas yang terkenal rawan korupsi – Kementerian Kesehatan, Konstruksi, Sumber Daya Air, serta perusahaan negara Uzbekneftegaz dan Uzsuvtaminot. ACA harus melaporkan setiap tahun kepada Dewan Nasional tentang berapa banyak faktor korupsi yang dihilangkan di badan-badan tersebut dan peningkatan nyata apa yang dirasakan orang sebagai hasilnya.
- **Investigasi Proaktif:** Mulai tahun ini, ACA, bersama dengan menteri, gubernur provinsi, dan walikota kota, akan melakukan penyelidikan di tempat triwulanan di setidaknya tiga distrik atau sektor yang paling korup. Mereka akan mempelajari masalah korupsi sistemik sehari-hari dan mengembangkan perbaikan – mengidentifikasi prosedur mana yang dapat didigitalkan dan rintangan birokrasi mana yang harus dihapuskan untuk menghilangkan peluang penyuapan.
- **Peta Jalan Akuntabilitas:** Dalam waktu dua bulan, pemerintah akan menyusun “peta jalan” yang komprehensif berdasarkan rekomendasi dari organisasi pemeringkat korupsi internasional. Rencana ini akan menugaskan tugas-tugas anti-korupsi khusus untuk setiap kementerian dan departemen, dengan jadwal yang jelas. Khususnya, ini akan mencakup proposal untuk menghukum para pemimpin lembaga yang menyebabkan keterlambatan implementasi, memastikan akuntabilitas atas kemajuan.
- **Dewan Lokal yang Diubah:** Semua dewan anti-korupsi provinsi akan sepenuhnya dibentuk kembali. Kepala dewan deputy masing-masing provinsi (legislatif daerah) akan ditunjuk sebagai ketua dewan antikorupsi regional yang baru. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan di tingkat lokal dengan menempatkan pemimpin lokal terpilih di garis depan upaya anti-korupsi.
- **Deklarasi Aset dan Hukum Pengayaan Terlarang:** Uzbekistan akan memperkenalkan undang-undang yang telah lama ditunggu-tunggu tentang deklarasi aset pegawai negeri. Rancangan undang-undang harus diterbitkan untuk masukan publik dan diserahkan paling lambat 1 April 2025 . Yang terpenting, undang-undang akan mencakup tanggung jawab atas pengayaan ilegal – mengharuskan pejabat untuk membuktikan asal sah aset mereka atau menghadapi konsekuensi hukum. Langkah ini sejalan dengan standar internasional dan mencerminkan praktik di beberapa negara tetangga.
- **Membatasi Hak Istimewa Resmi:** Presiden menyerukan untuk membatasi budaya kelebihan dalam pemerintahan. Penggunaan kendaraan dinas dan perabot kantor impor yang mahal akan berkurang secara signifikan, untuk diganti dengan alternatif yang diproduksi di dalam negeri. Langkah ini adalah tentang menetapkan nada kesopanan seperti halnya tentang memotong pengeluaran yang tidak perlu yang dapat melahirkan pelanggaran.
- **Reformasi Pengadaan yang Transparan:** Perubahan menyeluruh akan menargetkan pengadaan publik, sektor yang sering rentan terhadap suap. Kementerian Ekonomi dan Keuangan dan Kamar Akuntansi, bersama dengan komite anggaran parlemen, telah

diinstruksikan untuk mengurangi separuh volume pembelian langsung (tanpa penawaran). Pada akhir tahun, sistem pemantauan elektronik bertenaga AI akan diluncurkan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran pengadaan secara real time. Komisi ahli juga akan membuat platform online yang mencantumkan harga pasar rata-rata untuk barang, diperbarui secara berkala, untuk memandu pembelian pemerintah. Selain itu, aturan baru akan membatasi harga pembelian pemerintah hingga 20% di atas rata-rata pasar, dengan setiap pelanggaran ambang batas ini mengakibatkan hukuman dan denda.

Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan komprehensif, mengatasi korupsi dari berbagai sudut - mulai dari tindakan hukuman terhadap pejabat yang korup hingga sistem pencegahan yang menutup celah. Mirziyoyev menekankan bahwa “perang melawan korupsi adalah tugas nasional” yang membutuhkan keterlibatan parlemen, masyarakat sipil, dan media. Hasil pertemuan 5 Maret menandakan tekad Uzbekistan untuk mengintensifkan upaya anti-korupsi sejalan dengan praktik terbaik global, sambil juga mengatasi kelemahan lokal tertentu yang tetap ada.

Belajar dari Indonesia dan Malaysia

Uzbekistan juga telah mencari contoh ke luar dalam menyusun reformasi anti-korupsinya. Dua negara Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia, menawarkan model yang terkenal namun berbeda.

Malaysia dan Uzbekistan sama-sama mempekerjakan lembaga anti-korupsi khusus untuk memimpin perjuangan. Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) Malaysia, yang dibentuk oleh Undang-Undang SPRM 2009, adalah badan independen yang diberi wewenang untuk menyelidiki korupsi di sektor publik dan swasta. Ini mencerminkan ACA Uzbekistan, yang dibuat pada tahun 2020 untuk menyelidiki dan mencegah korupsi di seluruh domain pemerintah dan bisnis. Tidak ada negara yang hanya mengandalkan polisi atau peradilan reguler untuk pekerjaan anti-korupsi; sebaliknya, mereka memiliki profesional yang berdedikasi yang berfokus pada kasus korupsi. Yang penting, dalam kedua sistem tersebut, lembaga anti-korupsi bekerja bersama jaksa tradisional daripada sepenuhnya menggantikannya.

Di Malaysia, Komisaris Utama SPRM memiliki kekuasaan sebagai wakil jaksa penuntut umum dan lembaga tersebut dapat memulai dakwaan, tetapi setiap penuntutan harus disetujui oleh Jaksa Agung (yang menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umum). Ini sebanding dengan Uzbekistan, di mana bahkan ketika ACA memperoleh otoritas investigasi, Kantor Kejaksaan Agung mempertahankan peran untuk secara resmi memulai kasus pidana. Dengan kata lain, baik SPRM maupun ACA tidak memiliki independensi penuntutan yang tidak terkekang - keseimbangan yang disengaja untuk menjaga pengawasan hukum, tidak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia yang secara historis beroperasi dengan kekuasaan penuntutannya sendiri.

Kerangka hukum di Malaysia dan Uzbekistan juga menunjukkan kesamaan. Undang-

Undang MACC 2009 memberikan definisi komprehensif tentang penyuapan (menggunakan istilah “gratifikasi”) dan mencakup pelanggaran seperti penyuapan aktif dan pasif, penyalahgunaan kekuasaan, dan kegagalan untuk melaporkan korupsi, yang berlaku untuk hampir semua orang atau entitas. Undang-undang anti-korupsi Uzbekistan juga mengkriminalisasi pemberian atau penerimaan suap, penyalahgunaan jabatan, dan kejahatan terkait, dan amandemen baru-baru ini memperluasnya (misalnya, menambahkan penyuapan asing sebagai pelanggaran dan merencanakan klausul pengayaan ilegal).

Kedua negara telah memperbarui undang-undang mereka untuk menutup kesenjangan: Malaysia memperkenalkan tanggung jawab perusahaan atas korupsi pada tahun 2020 (Bagian 17A Undang-Undang SPRM), membuat perusahaan bersalah jika mereka gagal mencegah penyuapan oleh karyawan. Uzbekistan juga sedang mengembangkan langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban badan hukum; peta jalan barunya akan menyelaraskan undang-undang dengan standar internasional dan kemungkinan membawa persyaratan kepatuhan perusahaan, seperti yang diisyaratkan oleh seruan Presiden Mirziyoyev agar kementerian mengurangi hambatan birokrasi dan menerapkan langkah-langkah integritas.

Selain itu, Rencana Anti-Korupsi Nasional Malaysia (2019-2023) menyoroti reformasi seperti deklarasi aset untuk pejabat dan aturan pendanaan politik yang lebih ketat. Agenda Uzbekistan saat ini mencakup undang-undang deklarasi aset untuk pejabat publik, yang menunjukkan konvergensi dalam alat kebijakan. Kedua pemerintah mengakui bahwa transparansi dalam keuangan pejabat adalah kuncinya – Malaysia bahkan telah meluncurkan portal deklarasi aset online untuk anggota parlemen dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari reformasinya, dan SPRM telah mendesak membuat pengungkapan aset diwajibkan secara hukum. Undang-undang Uzbekistan yang akan datang menggemakan prioritas ini dengan mengamanatkan pengungkapan dan menegakkan hukuman untuk kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.

Dalam hal strategi implementasi, Malaysia dan Uzbekistan berbagi fokus pada pencegahan sistemik di samping penegakan hukum. SPRM Malaysia menyelenggarakan pendidikan publik, memiliki unit integritas di departemen pemerintah, dan bekerja untuk meningkatkan sistem tata kelola, sangat mirip dengan pendekatan Uzbekistan yang menanamkan petugas kepatuhan di kementerian dan mendigitalkan layanan untuk mengurangi interaksi tatap muka (yang sering melahirkan penyuapan). Kedua negara secara aktif bekerja sama dengan mitra internasional dalam peningkatan kapasitas. Faktanya, Uzbekistan telah berkolaborasi dengan Malaysia: pada Februari 2025 Badan Anti-Korupsi Uzbekistan menandatangani rencana aksi dengan SPRM untuk bertukar praktik terbaik dan pelatihan.

Kemitraan ini akan membuat Uzbekistan “mengadopsi pengalaman Malaysia dalam melatih pegawai negeri sipil tentang langkah-langkah anti-korupsi,” bersama-sama menerapkan program “uji kejujuran”, dan mengembangkan mekanisme pengendalian internal berdasarkan model Malaysia. Pertukaran semacam itu menggarisbawahi kedekatan antara kedua kerangka

kerja - Uzbekistan belajar dari keberhasilan (dan tantangan) Malaysia untuk membentuk jalannya sendiri. Sebaliknya, kerangka kerja anti-korupsi Indonesia, meskipun sangat efektif dalam konteksnya, secara struktural sangat berbeda dari Uzbekistan.

KPK Indonesia adalah komisi independen dengan kekuasaan luar biasa - dapat menyelidiki, menangkap, dan mengadili kasus-kasus korupsi melalui pengadilan khusus, yang beroperasi secara relatif otonom dari polisi dan jaksa reguler. Mandat kuat KPK menyebabkan tingkat hukuman hampir 100% dalam ratusan kasus profil tinggi selama dekade pertamanya, menjadikannya sebagai salah satu badan anti-korupsi paling agresif di dunia. Tingkat otonomi dan spesialisasi peradilan ini (Indonesia telah mendedikasikan Pengadilan Anti-Korupsi) tidak memiliki paralel langsung di Uzbekistan.

Bahkan, orang bisa mengatakan ACA Uzbekistan lebih dekat dalam semangat dengan MACC: keduanya adalah lembaga yang didirikan pemerintah yang bekerja dalam sistem penegakan yang ada, bukan cabang pemerintahan keempat yang sepenuhnya independen. Selain itu, kerangka hukum Indonesia, meskipun komprehensif (dengan undang-undang anti-korupsi yang keras sejak 1999), memiliki elemen unik seperti sistem gratifikasi yang mengharuskan pejabat untuk melaporkan hadiah apa pun atau dianggap korup - sebuah konsep yang kurang menonjol dalam hukum Uzbekistan atau Malaysia.

Kesimpulannya, kedua negara menekankan pendekatan yang seimbang: membentuk badan antikorupsi pusat yang mengkoordinasikan pencegahan, pendidikan, dan penegakan hukum; menerapkan undang-undang anti-penyuapan yang luas yang selaras dengan UNCAC; dan mengejar reformasi administrasi untuk membuat proses pemerintah terbuka dan akuntabel. Langkah-langkah Uzbekistan baru-baru ini - mulai dari menyusun undang-undang pengungkapan aset hingga mengintegrasikan pengawasan digital dalam pengadaan - langkah-langkah paralel dalam agenda reformasi Malaysia.

Sementara komisi independen Indonesia yang berani telah mencapai hasil yang luar biasa, modelnya akan mewakili keberangkatan yang lebih radikal dari jalur Uzbekistan saat ini. Bagi pembuat kebijakan Uzbekistan dan publik, Malaysia memberikan contoh yang relevan tentang bagaimana suatu negara dapat memperkuat integritas dalam struktur pemerintahan yang ada, sebuah pendekatan yang secara aktif diadaptasi oleh Uzbekistan melalui kerja sama langsung.

[Baca Artikel Asli di Website](#)

Tentang islamsantun.org:

Portal media yang berdedikasi menyebarkan diskursus Islam yang ramah, moderat, dan *rahmatan lil*

'alamin. Menyajikan ragam artikel keislaman, opini, khutbah, hingga sastra pesantren, islamsantun.org hadir sebagai rujukan literasi keagamaan yang sejuk dan mencerahkan bagi masyarakat luas.

Ditulis oleh **Temur Mirza**

Penulis adalah kontributor di islamsantun.org.

© 2026 islamsantun.org · Menyebarkan Islam yang rahmatan lil 'alamin